

BAB 1

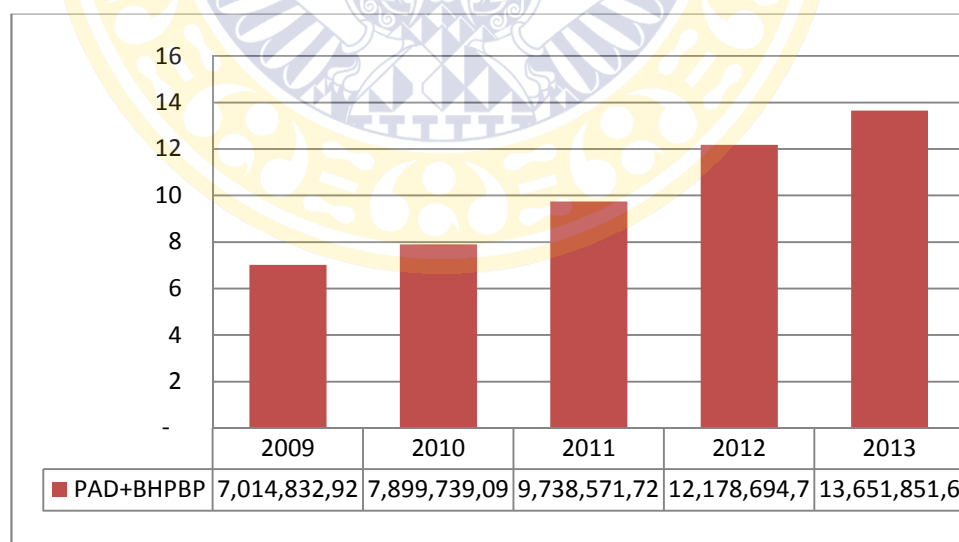
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang secara efektif dimulai pada Januari 2001, dan telah menjadi topik hangat dalam perjalanan era reformasi di Indonesia dalam mewujudkan masyarakat madani, terciptanya *good governance*, dan mengembangkan model pembangunan yang berkeadilan. Perjalanan menuju pelaksanaan desentralisasi tersebut merupakan perwujudan konkret akan adanya tuntutan pemberian otonomi yang luas kepada daerah. Kebijakan otonomi daerah ini bertujuan memberikan wewenang yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur pembangunan daerahnya sendiri (Ananda, 2002).

Pemerintah daerah diberi kewenangan yang lebih besar untuk dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan aspirasi masyarakat dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Kebijakan otonomi daerah juga bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi disparitas pendapatan antar daerah, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan dan potensi maupun karakteristik di daerah masing-masing (Pililian, 2003).

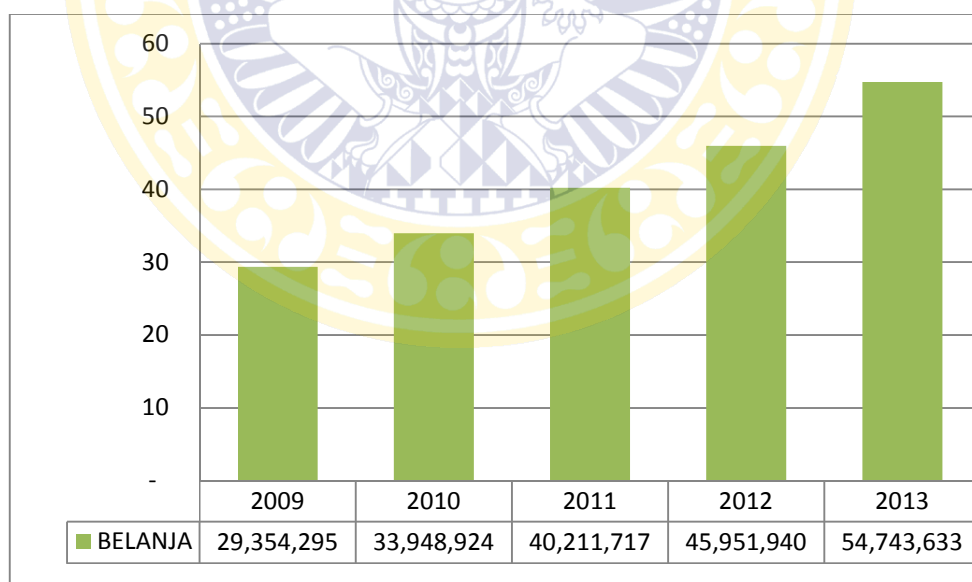
Desentralisasi menjadi sebuah paradigma baru, pemerintah daerah mempunyai peranan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, dimana pembangunan daerah tidak dapat dengan mudah dikendalikan dan direncanakan oleh pemerintah pusat. Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tersebut harus diimbangi dengan pelimpahan keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Kewenangan yang diserahkan kepada daerah otonom dalam rangka desentralisasi harus pula disertai penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, dan sumberdaya manusia (Sidik,2002). Mengingat, kemampuan keuangan daerah sebagai wujud kemandirian daerah sangat terbatas, penyelenggara fungsi pemerintah yang lebih luas tersebut harus didukung oleh sumber-sumber keuangan yang memadai. Tanpa adanya otonomi keuangan daerah, tidak akan pernah ada otonomi bagi pemerintah daerah (Ismail, 2002).



Sumber: Realisasi Anggaran APBD, DJPK Kemenkeu. (diolah)

Gambar 1.1
Total Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak (BHPBP) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat (dalam Triliun Rupiah)

Pada Gambar 1.1 halaman 2, dapat dilihat Total Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2009 adalah Rp 7.01 triliun dan tahun 2013 sebesar Rp 13.6 triliun. Total PAD dan BHPBP pada tahun 2009 hingga 2013 selalu mengalami peningkatan. Kota Bandung adalah kota dengan total PAD dan BHPBP terbesar di Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2013 total PAD dan BHPBP Kota Bandung sebesar Rp 1,668.49 miliar, dengan nilai rata-rata total PAD dan BHPBP sebesar Rp 967.48 miliar pada tahun 2009-2013. Sedangkan untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dengan nilai total PAD dan BHPBP terendah adalah Kota Banjar. Pada tahun 2013 nilai total PAD dan BHPBP sebesar Rp 129.84 miliar. Nilai rata-rata dari tahun 2009-2013 total PAD dan BHPBP hanya sebesar Rp 82.71 miliar.



Sumber: Realisasi Anggaran APBD, DJPK Kemenkeu. (diolah)

Gambar 1.2
Total Realisasi Anggaran Belanja Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat
(dalam Triliun Rupiah)

Pada Gambar 1.2 halaman 3 dapat dilihat Total Realisasi Anggaran Belanja kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2009 adalah Rp 29.354 triliun dan tahun 2013 meningkat sebesar Rp 54.74 triliun. Nilai Total Realisasi Anggaran Belanja dari tahun 2009-2013 selalu mengalami peningkatan. Kabupaten Bogor adalah kota dengan total Total Realisasi Anggaran Belanja terbesar di Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2013 total Realisasi Anggaran Belanja Kabupaten Bogor sebesar Rp 4,614 miliar, dan dengan nilai rata-rata dari tahun 2009-2013 Total Realisasi Anggaran Belanja sebesar Rp 2,585.53 miliar. Sedangkan untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dengan nilai total Realisasi Anggaran Belanja terendah adalah Kota Banjar. Pada tahun 2013 nilai total Realisasi Anggaran Belanja sebesar Rp 646.33 miliar. Nilai rata-rata dari tahun 2009-2013 total PAD dan BHPBP hanya sebesar Rp 386.44 miliar.

Tabel 1.1
5 Provinsi dengan Jumlah Penduduk tertinggi di Indonesia
Tahun 1990, 1995, 2000, 2010

No.	Provinsi	1990	1995	2000	2010
1	Jawa Barat	35,384,352	39,206,787	35,729,537	43,053,732
2	Jawa Timur	32,503,991	33,844,002	34,783,640	37,476,757
3	Jawa Tengah	28,520,643	29,653,266	31,228,940	32,382,657
4	Sumatera Utara	10,256,027	11,114,667	11,649,655	12,982,204
5	DKI Jakarta	8,259,266	9,112,652	8,389,443	9,607,787
	Indonesia	179,378,946	194,754,808	206,264,595	237,641,326

Sumber : Sensus Penduduk 1990, 2000 dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 1995, Badan Pusat Statistik.

Sejak diberlakukannya otonomi daerah, daerah otonom ditantang dan dituntut untuk mampu mencari alternatif sumber-sumber pembiayaan pembangunan di daerah serta menggunakan dana publik tersebut sesuai dengan prioritas dan aspirasi masyarakat di daerah. Dalam keadaan seperti ini, peranan

investasi swasta dan perusahaan milik daerah yang dapat membantu pemerintah daerah dalam upaya pengelolaan sumber daya secara efektif dan efisien serta untuk mengembangkan potensi daerah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah. Pengeluaran pemerintah yang tepat sebagai bentuk nyata dari campur tangan pemerintah dalam perekonomian, sangat penting dan menarik untuk diteliti. Pengeluaran pemerintah sebagai salah satu instrument penting kebijakan fiskal diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah mengoptimalkan peran tersebut dengan meningkatkan pengeluaran terhadap Pendapatan Domestik Bruto (Brata, 2005).

Hal ini menjadi tantangan bagi seluruh wilayah otonom Indonesia, termasuk Provinsi Jawa Barat. Pada Tabel 1.1 pada halaman 4, Provinsi Jawa Barat adalah provinsi dengan jumlah penduduk tertinggi urutan pertama di Indonesia. Provinsi Jawa Barat merupakan wilayah yang potensial untuk dikembangkan karena selain letak geografis yang menguntungkan dan memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup besar. Secara administratif Provinsi Jawa Barat terdiri dari 17 kabupaten dan 9 kota. Provinsi Jawa Barat juga penggerak perekonomian di kawasan Indonesia Barat, tentunya memiliki jumlah pendapatan daerah yang tidak sedikit. Selain itu Provinsi Jawa Barat juga mempunyai daerah yang cukup luas dibanding provinsi lain di Pulau Jawa.

Tabel 1.2
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Provinsi-Provinsi Di Pulau Jawa
Tahun 2009-2013 (Miliar Rupiah)

	Provinsi	2009	2010	2011	2012	2013
1	DKI Jakarta	371,469.50	395,622.44	422,242.25	449,805.42	477,285.25
2	Jawa Timur	320,861.17	342,280.76	366,983.28	393,662.85	419,428.45
3	Jawa Barat	303,405.25	322,223.82	343,193.56	364,752.40	386,838.84
4	Jawa Tengah	176,673.46	186,992.99	198,270.12	210,848.42	223,099.74
5	Banten	83,453.73	88,552.19	94,198.17	99,992.41	105,856.07
6	DI Yogyakarta	20,064.26	21,044.04	22,131.77	23,308.56	24,567.48

Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Barat. (diolah)

Tabel 1.2 pada halaman 6, menjelaskan tentang Kondisi perekonomian makro Provinsi Jawa Barat diantara provinsi-provinsi lain di Pulau Jawa, berikut adalah rincian PDRB menurut harga konstan 2000 provinsi-provinsi di Pulau Jawa periode tahun 2009-2013. Melalui indikator makro, PDRB Jawa Barat terus mengalami kenaikan dari 303.405,25 miliar rupiah pada tahun 2009, meningkat hingga 386.838,84 miliar rupiah pada tahun 2013. Jumlah PDRB Jawa Barat masih di bawah provinsi DKI Jakarta dan provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2013 posisi tertinggi ditempati DKI Jakarta yaitu sebesar 477.285,25 miliar rupiah. Selanjutnya posisi kedua adalah provinsi Jawa Timur dan kemudian Jawa Barat, nilai PDRB masing-masing sebesar 419.428,45 miliar rupiah dan 386.838,84 miliar rupiah.

Tabel 1.3
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan dan
Jumlah Penduduk di Provinsi Jawa Barat

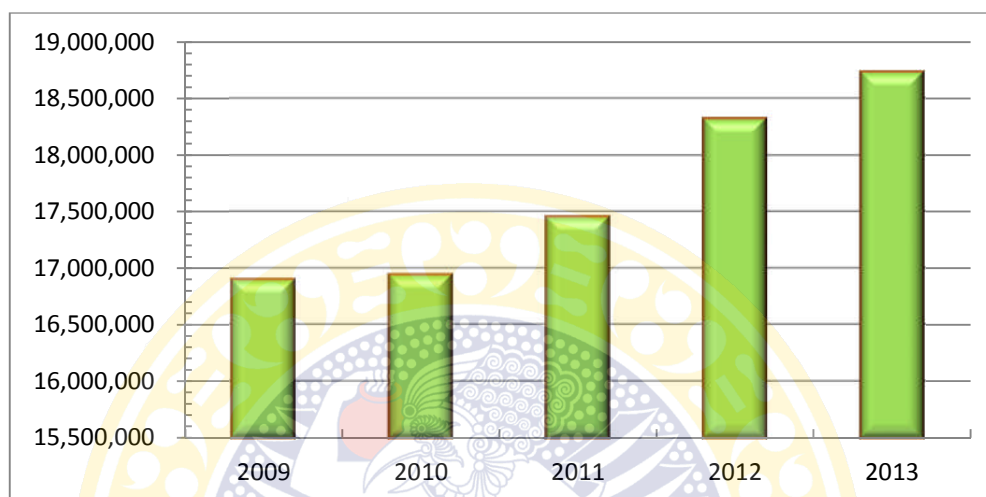
Tahun	PDRB (Juta Rupiah)	Pertumbuhan (%)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	PDRB perkapita (Rupiah)	Pertumbuhan (%)
2009	290,194,942.68	5.05	42,693,349	6,797,193	1.47
2010	307,830,606.43	5.53	43,021,826	7,155,219	5.27
2011	327,111,138.77	5.76	43,826,775	7,463,728	4.31
2012	346,931,200.47	5.61	44,294,071	7,832,452	4.94
2013	369,462,739.37	6.01	45,340,799	8,148,571	4.04

Sumber : Data Makro Sosial Ekonomi, Badan Pusat Statistik Jawa Barat, (diolah)

Pertumbuhan ekonomi tersebut tentu dipengaruhi oleh berbagai dinamika ekonomi yang terjadi di 17 kabupaten dan 9 kota yang ada di Provinsi Jawa Barat. Pertumbuhan ekonomi (*growth*) tersebut merupakan laju pertumbuhan yang dibentuk dari berbagai macam sektor ekonomi yang menggambarkan kinerja ekonomi yang terjadi di daerah. Pertumbuhan ekonomi merupakan ukuran yang paling lazim digunakan untuk mengetahui perkembangan kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah tertentu dari waktu ke waktu.

Kegiatan Pembangunan nasional tidak lepas dari peran seluruh pemerintah daerah yang telah berhasil memanfaatkan segala sumberdaya yang tersedia di daerah masing-masing. Sebagai upaya memperbesar peran dan kemampuan daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangga. Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, pemerintah daerah tingkat satu memanfaatkan segala sumberdaya yang tersedia di daerah itu dan dituntut untuk bisa lebih mandiri. Terlebih dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka pemerintah daerah tingkat satu harus bisa mengoptimalkan pemberdayaan semua potensi yang

dimiliki, dan perlu diingat bahwa pemerintah daerah kabupaten dan kota tidak boleh terlalu mengharapkan bantuan dari pemerintah pusat seperti pada tahun-tahun sebelumnya.



Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat (2014).

Gambar 1.3
Total Tenaga Kerja Terserap di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat 2009-2013 (jiwa)

Penerapan desentralisasi fiskal di Indonesia ini diharapkan dapat memicu pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja terserap di daerah-daerah semakin meningkat. Tenaga kerja terserap dalam penelitian ini adalah penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja selama seminggu lalu. Jumlah tenaga kerja terserap di Provinsi Jawa Barat selalu meningkat setiap tahunnya.

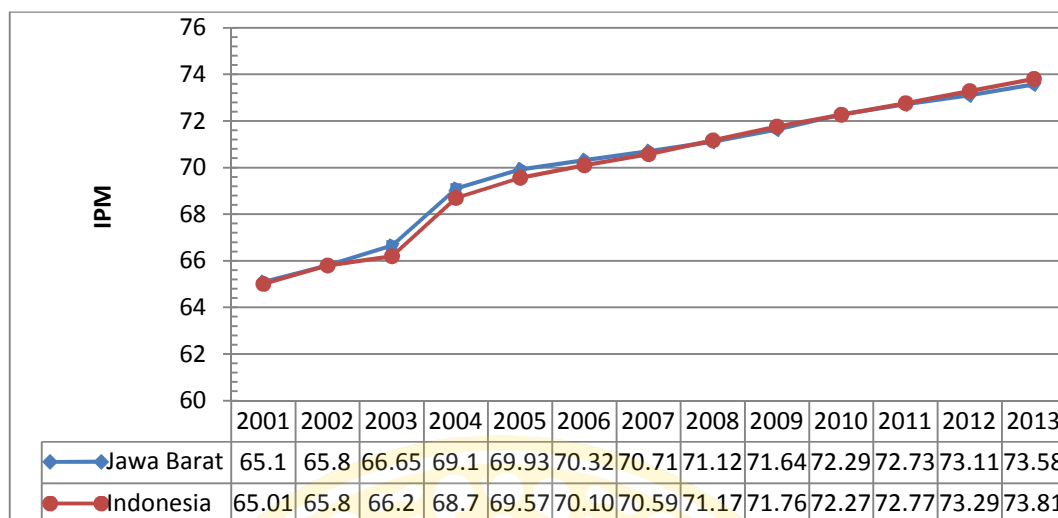
Berkaitan dengan proses pembangunan yang telah dilaksanakan di satu sisi telah mencapai keberhasilan di berbagai bidang yang salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, namun di sisi lain sebenarnya Indonesia masih menghadapi persoalan yang berkaitan dengan pemerataan. Ketimpangan ini juga perlu diperhatikan karena keberhasilan suatu pembangunan tidak hanya

diukur dari laju pertumbuhan output yang tinggi, tetapi juga dilihat apakah pembangunan selama ini relatif merata di seluruh pelosok Indonesia. Penerapan desentralisasi fiskal di Indonesia juga diharapkan mampu mengurangi terjadinya disparitas pendapatan antar daerah. Pembangunan dalam lingkup negara secara spasial tidak selalu merata. Disparitas pendapatan antar daerah seringkali menjadi permasalahan serius. Beberapa daerah dapat mencapai pertumbuhan yang cukup cepat, sementara beberapa daerah lain mengalami pertumbuhan yang lambat. Masing-masing daerah tersebut tidak mengalami kemajuan yang sama disebabkan oleh karena adanya perbedaan potensi yang dimiliki tiap daerah.

Tolak ukur keberhasilan kinerja ekonomi juga dapat dilihat dari struktur ekonomi, dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antar penduduk, antar daerah, antar sektor. Indikator ini penting untuk mengetahui keberhasilan pembangunan yang telah telah dicapai dan dapat digunakan untuk menentukan arah pembangunan di masa yang akan datang. Untuk melihat sejauh mana kinerja ekonomi di suatu daerah berjalan dengan baik atau tidak maka diperlukan indikator-indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan kinerja ekonomi tersebut. Indikator kunci secara garis besar dapat di klasifikasikan menjadi indikator ekonomi dan indikator sosial (Kuncoro, 2004:19). Indikator ekonomi terdiri dari GNP perkapita, laju pertumbuhan ekonomi, GDP perkapita dengan *purchasing power parity*, dan indikator social meliputi *Human Development Index (HDI)* atau yang sering disebut dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan *Physical Quality Life Index (PQLI)* atau disebut juga Indeks Mutu Hidup. Indikator sosial digunakan untuk menggambarkan apakah dan

bagaimana kondisi pembangunan manusia yang terjadi di masyarakat sebagai hasil dari pembangunan di negara atau wilayah tersebut.

Indikator untuk melihat kemampuan daerah dalam aspek modal manusia antara lain menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mengukur tentang indikator kesehatan, pendidikan dan pengeluaran riil. Kinerja ekonomi mempengaruhi pembangunan manusia khususnya melalui aktivitas rumah tangga dan pemerintah (Brata, 2002). Adanya tingkat pembangunan yang berbeda-beda antar daerah mengakibatkan terjadinya perbedaan yang mencolok dalam hal pendapatan masyarakat serta sarana prasarana ekonomi maupun sosial. Hal ini membuat kemampuan penyelenggaraan aspek-aspek pembangunan manusia antar daerah pun menjadi berbeda-beda. Dengan demikian, jika nilai IPM suatu daerah rendah, maka hal ini tidak hanya menunjukkan kegagalan pembangunan ekonomi dan rendahnya kualitas SDM, tetapi juga kegagalan dari pembangunan kesejahteraan sosial di daerah tersebut.



Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat (2014)

Gambar 1.4
Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Barat dan Indonesia
Tahun 2001-2013

Seperti yang telah diulas sebelumnya bahwa pertumbuhan ekonomi yang terus maju pesat tanpa ditunjang dengan pemerataan hasil pembangunan akan menyebabkan terjadinya disparitas ekonomi di beberapa wilayah. Kinerja perkenomian di Jawa Barat dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kondisi fluktuatif yang artinya beberapa kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat masih mengalami fluktuasi dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun demikian Provinsi Jawa Barat telah berhasil mencatatkan prestasi dengan pertumbuhan ekonominya yang tinggi dan kontribusinya dalam PDB yang menempati urutan peringkat dari 33 provinsi di Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat ini ternyata tidak di ikuti dengan pemerataan pembangunan ekonominya. Menurut Laporan Akhir Evaluasi Kebijakan Pembangunan Daerah Jawa Barat (2011) dinyatakan bahwa permasalahan ketimpangan pembangunan dapat muncul dari setiap kegiatan

pembangunan yang dilaksanakan di setiap daerah atau wilayah manapun. Hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor, seperti lemahnya perencanaan pembangunan ataupun kurangnya kajian mendalam terhadap kondisi daerah yang memerlukan perhatian lebih. Menurut Esmara (1986:385), ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya ketimpangan antar daerah, diantaranya adalah faktor sumberdaya alam dan sistem alokasi anggaran dari pemerintah pusat.

Namun beberapa studi empiris di banyak Negara Sedang Berkembang (NSB), seperti di Afrika, Asia, dan Amerika Latin menunjukkan bahwa laju pertumbuhan yang tinggi tidak serta merta membawa manfaat yang berarti bagi para penduduknya, banyak penduduk di negara-negara tersebut tetap miskin walaupun laju pertumbuhan ekonominya tinggi. Ada banyak faktor yang tadinya dianggap sebagai residual (dalam model Solow) ternyata berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi seperti investasi modal manusia dan kemajuan teknologi (Jhingan, 2004:423).

Adanya kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah diharapkan dapat menggerakkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah itu sendiri, dimana skala prioritas pembangunan dapat direncanakan, diprogramkan dan dilaksanakan. Hal tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan dan mengembangkan penggalan potensi masing-masing dengan baik. Dipilihnya Jawa Barat dalam penelitian ini karena Jawa Barat memiliki prestasi yang bagus dalam perekonomian dengan angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan

kontribusinya dalam PDB nasional yang cukup besar dibandingkan dengan wilayah lain

Namun sayangnya, kondisi ekonomi yang cukup bagus ini tidak diikuti dengan pemerataan pembangunan. Masih adanya ketimpangan di beberapa wilayah Jawa Barat mengindikasikan bahwa pemerintahan Provinsi Jawa Barat masih belum bisa mengusahakan pemerataan bagi masyarakatnya. Permasalahan kesenjangan IPM akibat dari ketimpangan pendapatan antar wilayah ini perlu diperhatikan karena keberhasilan suatu pembangunan tidak hanya diukur dari laju pertumbuhan ekonominya yang tinggi, akan tetapi juga dilihat apakah pembangunan yang terjadi selama ini relative merata di seluruh pelosok daerah. Oleh karena itu, studi ini akan meneliti dan melihat tentang peran desentralisasi fiskal terhadap kinerja ekonomi di kabupaten/kota provinsi Jawa Barat. Dengan mengetahui tentang peran desentralisasi fiskal di Jawa Barat, diharapkan terjadi pemerataan pembangunan sesuai dengan keinginan daerah dalam mengembangkan wilayah menurut potensi masing-masing dan proses pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang dikemukakan sebelumnya, terdapat dua pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah ada pengaruh derajat desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat?

2. Apakah ada pengaruh derajat desentralisasi fiskal terhadap tenaga kerja terserap di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat?
3. Apakah ada pengaruh pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja terserap secara bersama-sama dan parsial terhadap disparitas pendapatan di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat?
4. Apakah ada pengaruh disparitas pendapatan terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah sebelumnya, maka tujuan dilakukannya penelitian ini antara lain adalah:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh derajat desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh derajat desentralisasi fiskal terhadap tenaga kerja terserap di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja terserap secara bersama-sama dan parsial terhadap disparitas pendapatan di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh disparitas pendapatan terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan mengenai pengaruh derajat desentralisasi fiskal terhadap kinerja ekonomi di Provinsi Jawa Barat.
2. Bagi pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan dalam pengelolaan keuangan daerah dalam hal ini desentralisasi fiskal dalam upaya mendorong kinerja ekonomi di Provinsi Jawa Barat.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan menjadikan sebagai referensi bagi penelitian lain yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

1.5. Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini terbagi menjadi lima bagian yang saling berkaitan yaitu sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang landasan teori yang digunakan untuk mendekati permasalahan yang diteliti. Dalam bab ini juga akan menguraikan tentang pengkajian hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya serta berisi tentang model analisis, hipotesis, dan kerangka berfikir.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini akan menguraikan tentang pendekatan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data serta teknik analisis.

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang deskripsi penelitian, analisis data, pembuktian hipotesis dan pembahasan mengenai hasil analisis. Uraian objek penelitian dan analisis penelitian didasarkan pada data yang diperoleh, baik data sekunder maupun data yang telah diolah oleh penulis.

BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang terdiri dari simpulan dan saran. Simpulan berisi tentang kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya serta saran yang diajukan sebagai alternatif pemecahan masalah sehingga diharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.